

# **Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan**

**Alif Farhan Arifin**

13040674088 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: conk.aliph@gmail.com

**Indah Prabawati**

0029077404 (S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) e-mail: Prabawatiindah@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Batik adalah kerajinan tradisional Indonesia yang sudah turun-temurun yang kaya akan ragam dan nilai budaya, Batik ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, Maka dari itu Bupati Pamekasan untuk melestarikan batik dan mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan dikeluarkanlah kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 Perihal Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan. sampai akhirnya Kabupaten Pamekasan didelarasikan oleh Gubernur Jawa timur sebagai kabupaten batik di Jawatimur, Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi serta kendala apa saja yang terdapat pada Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Sekolah Negeri, Pengrajin Batik Tulis Pamekasan. Teknik Pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan ini dari beberapa variabel berikut : 1) Sumber Daya, dalam kebijakan ini yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu yang sudah sangat memadai, tetapi untuk sumber daya dana telah tersedia ketika sekolah mengkordinir seragam batik dari sekolah. 2) Standar dan Sasaran Kebijakan, dari hasil penelitian standart dan sasaran kebijakan untuk mengembangkan UKM batik tulis Pamekasan mulai mengalami hambatan karena banyak sekolah yang tidak mewajibkan siswa-siswinya memakai batik tulis Pamekasan. 3) Karakteristik Agen Pelaksana, untuk dinas pendidikan sendiri masih kurang tegas dan disiplin melaksanakan kebijakan hal ini yang dapat dilihat dari tidak ada pemantauan perihal kebijakan ini. 4) Komunikasi antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi yang sedang berjalan juga mengalami kendala dimana beberapa kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait kendala yang sedang dihadapi. 5) Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi), dukungan dari pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang kurang baik dimana tidak ada sosialisasi berkelanjutan perihal kebijakan. 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, ketiga elemen ini memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan. Faktor sosial, seperti rendahnya pendidikan masyarakat. Faktor ekonomi, seperti rendahnya perekonomian wali murid, khususnya yang tinggal di desa. Faktor Politik, seperti pergantian bupati selama 2 periode. Faktor-faktor tersebut yang menghambat kebijakan dan mengakibatkan kebijakan yang telah dicanangkan kurang diperhatikan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 berjalan kurang baik, maka saran peneliti adalah melakukan sosialisasi dan pemantauan kembali ke sekolah dan membangun komunikasi dengan pengrajin batik tulis untuk memproduksi batik dengan harga terjangkau.

Kata Kunci: Implementasi, Batik Tulis Lokal Pamekasan

## **Abstract**

Batik is a traditional craft that has been passed down through generations that are rich in diversity and cultural values. Batik designated as world cultural heritage by UNESCO. For the reason, the regent of Pamekasan to preserve batik and UKM of batik tulis development policy was issued Pamekasan Pamekasan Regent No. 530/320 /441.303/2007 regarding to the use of uniforms Batik Pamekasan Produced by Craftsmen and finally Pamekasan declared by the Governor of East Java as batik districts in East Java. The aim of this study is to describe and explain the implementation and what obstacles are contained in the Policy Implementation Regent Pamekasan District No. 530/320/441 303/2007 on the Use of Uniforms Batik Produced by craftsmen in Environmental Education Department Pamekasan Pamekasan.

The type of this research is descriptive qualitative approach. Subjects consist of Head of Education Department Pamekasan, Principal State, Craftsman of Batik Pamekasan. Data collection techniques consist

of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques performed with data collection, data reduction, data presentation and conclusion .

The results showed Policy Implementation Regent Pamekasan of some of the following variables: 1) Resources, in this policy that is used are the human resources and time resources that has been very adequate, but for fund resources have been available when the school coordinated batik uniforms of school. 2) Standards and Policy Goals, from research results standards and policy targets for developing UKM Batik Tulis Pamekasan began to run into difficulty because a lot of schools do not require their students to wear batik Pamekasan. 3) Characteristics of the Executing Agency, for the education department itself was less strict and disciplined implementing this policy which can be seen from no monitoring regarding this policy. 4) Communication between the Organization and Implementation Activities, ongoing communication also experienced problems where some principals do not coordinate with the department of education-related obstacles being encountered. 5) The attitude / tendency The Executor (Dispositions), the support of the executive in implementing policies which is not good where there is no policy regarding the ongoing socialization. 6) Social Environment, Economics and Politics, these three elements have a major impact on policy. Social factors, such as lack of education community. Economic factors, such as low economic parents, especially those living in villages. Political factors, such as the turn of the regent during the second period. These factors that hinder policies and policies that have been implemented resulting in less attention.

Therefore, it can be concluded that the Policy Implementation Pamekasan Regent No. 530/320/441 303/2007 running poorly, then the suggestions are to disseminate research and remonitoring to school and establish communication with batik artisans to produce batik at an affordable price.

Keywords: Implementation, Local Batik Pamekasan

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang heterogen yang juga mempunyai beragam ras, etnis atau suku bangsa, hal tersebut yang menjadikan Bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan. Disetiap daerah memiliki kebudayaan sendiri yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut sekaligus identitas daerah sehingga perbedaan inilah yang menjadi kekayaan yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain.

Salah satu kebudayaan Bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih ada adalah batik, Batik merupakan kerajinan tradisional turun-temurun yang kaya akan ragam dan nilai budayanya, sehingga batik tidak hanya mendapat pengakuan regional dan nasional melainkan sudah mendapat pengakuan secara internasional hal ini terbukti dengan ditetapkannya batik sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO yang menetapkan batik Indonesia sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) pada tanggal 2 Oktober 2009. Seperti halnya yang juga disampaikan oleh Arif Murtadlo dalam penelitiannya :

“Penetapan kain tradisional batik sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia antara lain dengan menimbang batik sebagai kerajinan tradisional turun-temurun dari Indonesia yang kaya akan nilai budaya. Seni batik merupakan salah satu kesenian khas Indonesia yang telah ada sejak berabad-abad

lamanya hidup dan berkembang, sehingga menjadi salah satu bukti peninggalan sejarah budaya bangsa Indonesia. Dalam penilaiannya, UNESCO juga meneliti perlindungan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap batik.”

([www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/181/14](http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/181/14) (diakses 04 mei 2016))

Setiap daerah di Indonesia memiliki corak dan motif khas batik tersendiri begitupun dengan batik Madura pada khususnya batik Pamekasan yang telah menjadi salah satu batik yang dikenal oleh konsumen dan kolektor konveksi/ kolektor batik yang dikenal berkualitas baik dari segi bahan dan motif. Melihat potensi ini Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan usaha-usaha untuk memaksimalkan potensi dari sektor batik ini seperti pemberian bantuan bagi kelompok pengrajin batik tulis Pamekasan, Pameran batik di luar daerah Pamekasan serta dikeluarkannya kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 Perihal Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan. sampai akhirnya Kabupaten Pamekasan dideklarasikan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai Kabupaten batik di Jawatimur, Tentunya hal ini bukan tanpa alasan dari tiga belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan tujuh kecamatan menjadi Kecamatan penghasil batik hal tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Pamekasan sekaligus mendapat tanggungjawab yang besar bagi semua pihak yang ada baik pemerintah, pihak swasta

maupun masyarakat dalam melestarikan batiknya karena sudah menjadi barometer batik di Jawa timur, pendekklrasian ini dilakukan saat acara Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong tingkat Provinsi tahun 2009 oleh Gubernur Jawa Timur.

Pendeklarasian tidak sertamerta membuat perkembangan batik Pamekasan berjalan dengan baik. Mulai munculnya permasalahan mengenai terancamnya kelestarian batik lokal dan pengrajin batik di Kabupaten Pamekasan yang salah satu penyebabnya adalah lemahnya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten setempat dalam mempromosikan dan memajukan batik tulis Pamekasan di pangsa pasar lokal daerah Pamekasan sendiri. Hal ini menyebabkan pasar batik lokal lemah seperti yang di sampaikan salah satu Pengrajin Batik Tulis Asal Kampung Batik, Dusun Nang Kernang Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pak Mastur mengatakan, saat ini pasar batik untuk lokal Kabupaten Pamekasan dan bahkan di Pulau Madura sangat lambat sehingga para pengrajin batik lebih fokus mengembangkan penjualan batiknya di pasar regional serta pasar nasional.

“ Untuk pasar lokal sendiri sangat lambat mas, jadi kita pasarkan keluar,” katanya kepada sejumlah wartawan.

Kalau pengolahannya tetap, tapi harganya tidak sesuai, makanya banyak pekerja yang berhenti membatik. Kalau dulu, penjualan batik itu bagus,” ungkapanya, Rabu (17/2/2016). Dia meminta, pemerintah tidak tinggal diam perihal masalah batik tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan cara membuat kebijakan baru yang menguntungkan masyarakat. Utamanya pengrajin batik.

(<http://portalmadura.com/penjualan-batik-merosot-tajam-ekonomi-pengrajin-lesu-45323/> diakses 21 April 2016).

Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 Perihal Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan, untuk memakai batik pada hari Jumat dan Sabtu namun pada kenyataannya yang dipakai bukanlah batik lokal Pamekasan khususnya yang dipakai oleh para siswa/siswi di Pamekasan, hal ini berdampak juga kepada para pengrajin batik lokal yang banyak gulung tikar karena permasalahan tersebut. Seperti yang disampaikan Abdul Azis salah satu pengusaha batik Desa Klampar, kecamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan

”Merosotnya pasar batik lokal Pamekasan ini karena tidak adanya tekanan dari pemerintah

agar semua staf dan sekolah-sekolah untuk menggunakan batik seperti tahun 2009 silam,” (<http://korankabar.com/3-tahun-merugi-3-skpd-diam/>. Diakses 8 September 2016)

Dari permasalahan tersebut perlunya mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terkait dalam kebijakan juga memegang peranan penting dalam menyukseskan suatu implementasi kebijakan seperti yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier.

Suatu implementasi kebijakan akan berhasil jika seluruh komponen yang ada dan seluruh stakeholdernya dalam kebijakan ini mempunyai tujuan dan upaya yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Mazmanian dan Sabatier (Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab 2005: 45)

Seperti halnya dalam kebijakan ini yaitu memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan industri kecil batik tulis di Kabupaten Pamekasan serta untuk melestarikan batik lokal Pamekasan. Dilihat dari sisi implementor yaitu Pemerintah Kabupaten Pamekasan serta kelompok sasarannya yaitu seluruh instansi Pemerintah yang ada di lingkungan Kabupaten Pamekasan khususnya di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang cukup banyak berdampak banyak pada berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan ini karena menurut data referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan terdapat 1459 sekolah.

Jumlah sekolah yang cukup banyak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini juga sangat berdampak terhadap implementasi kebijakan tersebut karena berdasarkan observasi awal masih banyak sekolah yang belum melaksanakan kebijakan ini secara baik hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak siswa/siswi Pamekasan yang tidak memakai batik lokal Pamekasan. Oleh karenanya perlunya mengetahui bagaimana jalannya proses implementasi dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Karena meskipun sudah ada upaya dari Pemerintah Kabupaten Pamekasan yaitu melalui dikeluarkannya kebijakan ini namun tetap perlu diteliti bagaimana proses implementasinya apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah digariskan dalam kebijakan tersebut.

Penulis memilih judul penelitian “**Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten**

**Pamekasan**". Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis terkait implementasi kebijakan yang fokus pada pelestarian kebudayaan lokal daerah sehingga dapat memberikan masukan bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dalam implementasi kebijakan tersebut.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Pamekasan didasarkan pada:

Kabupaten Pamekasan merupakan Kabupaten yang telah dideklarasikan sebagai Kabupaten batik di Jawa Timur namun pada kenyataannya masih banyak sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang tidak mewajibkan memakai batik lokal Pamekasan yang mengakibatkan banyak UMKM batik di Pamekasan yang mulai gulung tikar

Fokus dari penelitian ini yaitu variabel implementasi kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu:

### a. Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Begitupun dengan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap implementasi dilihat dan dianalisis ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

### b. standar dan sasaran kebijakan

Untuk melihat apakah Standar dan sasaran kebijakan sudah jelas dan terstruktur, sehingga kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi diantara agen implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 yang mana sasaran dalam kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan industri kecil batik tulis lokal Pamekasan

### c. karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan elite politik mendukung Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007.

### d. komunikasi antar organisasi dan Aktivitas pelaksana

Dalam kebijakan ini perlunya melihat komunikasi yang terjadi karena dalam implementasi sebuah kebijakan terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan agar tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dapat dicapai. Semakin baik organisasi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan berpeluang kecil begitu pula sebaliknya. Mengingat dalam Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 ini melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pamekasan seperti halnya komunikasi Dinas Pendidikan dengan seluruh sekolah yang ada di Pamekasan serta dengan para pengrajin batik tulis lokal Pamekasan

### e. Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi)

Respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 juga sangat penting untuk diteliti karena sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

### f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomilingkungan dapat mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk melihat kinerja Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 adalah dengan cara sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan tersebut karena Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan menjadi permasalahan dari kinerja implementasi kebijakan jika tidak kondusif.

Subjek penelitian meliputi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Kepala Sekolah Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, dan pengrajin batik tulis Pamekasan Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dapat dikategorikan

sebagai suatu kebijakan karena merupakan suatu keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan selaku pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Bupati Pamekasan dan telah memiliki payung hukum yang jelas dan telah diimplementasikan untuk melestarikan dan menjaga kelestarian batik lokal Pamekasan.

Dalam kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ada beberapa unsur yang diperhatikan yang pertama adalah Unsur pelaksana, dalam kebijakan ini pelaksananya adalah Bupati dan seluruh Pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan untuk siswa-siswi pelaksananya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan beserta seluruh kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Unsur yang kedua adalah program atau kebijakan yang dilaksanakan adalah kebijakan memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan yang sarannya adalah siswa-siswi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan untuk mengembangkan potensi daerah dan UKM batik tulis lokal di Kabupaten Pamekasan melalui penguatan pasar lokal yang diharapkan dapat meningkatkan produksi dan konsumsi batik tulis lokal Pamekasan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dimana seluruh keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam formulasi kebijakan dan telah disahkan dalam kebijakan tersebut dilaksanakan, sehingga pada suatu kebijakan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang telah ditentukan. Penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan akan dianalisis menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn karena dari model ini yang tidak hanya fokus pada aspek internal suatu kebijakan melainkan model ini juga memperhatikan aspek eksternal seperti aspek lingkungan sosial ekonomi dan politik dari para aktor dan target sasaran serta pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas dan nyata terkait Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

#### 1) Sumber Daya

Pada tahap implementasi dilihat dan dianalisis ketersediaan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya yang memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan bahwa tidak ada sumber daya dana yang digunakan dalam proses implementasi karena dalam kebijakan ini tidak ada anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, sumberdaya yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu

Sumber daya yang digunakan berupa sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sumber daya waktu yang ada untuk mengimplementasikan kebijakan tentang pemakaian seragam batik lokal Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini secara kuantitas tidak mengalami permasalahan, Dalam sumber daya waktu yang diperlukan sudah sangat mencukupi mengingat hal kebijakan ini sudah terimplementasi sudah berjalan lama dan tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya karena kebijakan terus berjalan dengan terus menerus sejak tahun 2007 kebijakan ini dikeluarkan hingga saat ini tetap berlaku kebijakan ini

Adanya sumber daya dana hanya ada pada sekolah-sekolah yang menyeregamkan batik tulis lokal yang seragam batiknya diakomodir oleh sekolah itu sendiri namun sudah disepakati wali murid dan komite sekolah, untuk sekolah yang membebaskan seragam batik bagi siswanya tidak ada anggaran dana khusus karena dengan sendirinya batik yang dipakai langsung beli sendiri, Sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi kebijakan ini sudah sangat memadai tinggal bagaimana pelaksana kebijakan memanfaatkan dengan maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan

#### 2) Standar dan sasaran kebijakan

Sasaran dalam kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri kecil batik tulis lokal Pamekasan yang selanjutnya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pengrajin batik tulis lokal Pamekasan yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor

530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan bahwa hal yang melatar belakangi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah banyaknya masyarakat yang menjadi pengrajin batik lokal Kabupaten Pamekasan sehingga menjadi UKM yang berpotensi baik untuk Pamekasan serta khususnya masyarakat pengrajin batik Lokal Pamekasan sehingga hal tersebut menjadi sebuah standart serta sasaran dari kebijakan Bupati Pamekasan ini. Sedangkan yang hal yang melatar belakangi kebijakan tersebut menurut kepala sekolah ialah untuk memberikan suatu pendidikan yang penting bagi siswa-siswi untuk mencintai dan melestarikan kebudayaan lokal daerah.

Sasaran dari Implementasi Kebijakan ini adalah pengembangan UKM Batik tulis lokal pamekasan. Sedangkan yang menjadi kelompok sasaran adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan. Namun akhir-akhir ini kebijakan ini mulai mengalami permasalahan karena sasaran dan target awal kebijakan untuk menumbuhkembangkan UKM batik tulis lokal Pamekasan karena produksi batik tulis lokal Pamekasan mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya masih banyak siswa-siswi sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang tidak memakai batik tulis lokal Pamekasan.

Tentunya keadaan ini perlu penanganan dari pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 agar kebijakan ini kembali sesuai dengan sasaran sebagaimana yang telah menjadi latar belakang dan sasaran dari kebijakan Bupati Pamekasan ini sehingga omset penjualan batik dari para pengrajin batik tulis lokal Pamekasan kembali naik dan dapat membantu meningkatkan kembali perekonomian pengrajin, sehingga sasaran untuk menumbuhkembangkan UKM batik tulis lokal Pamekasan tercapai.

### 3) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi kebijakan memakai batik tulis lokal bagi siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang mendapat aturan langsung dari Bupati Pamekasan dan selanjutnya dilanjutkan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan,

dalam kebijakan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan beserta sekolah-sekolah yang berada di naungannya sama-sama menjadi pelaksana kebijakan Bupati Pamekasan tentang pemakaian batik tulis lokal Pamekasan

#### a. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan memang masih ada yang kurang sesuai dengan hasil dilapangan yang masih banyak menemui siswa-siswi yang tidak memakai seragam batik tulis lokal Pamekasan. terkait dengan masalah masih banyaknya siswa-siswi yang tidak memakai batik tulis lokal Pamekasan menunjukkan kurangnya ketegasan dari para pelaksana yaitu yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Setiap perbaikan dalam sebuah kebijakan dirasa perlu untuk dilakukan agar kebijakan dalam pelaksanaannya semakin baik dikemudian hari. Berkaitan dengan hal ini, Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007. Dalam implementasi kebijakan memakai batik tulis lokal bagi siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaannya hingga saat ini hampir tidak pernah dilakukan pemantauan karena pelaksana khususnya Disdik Kabupaten Pamekasan cenderung menilai kebijakan sudah berjalan baik meskipun sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan.

#### b. Kepala sekolah dilingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dalam hal ini beberapa kepala sekolah yang masih tidak mewajibkan memakai batik tulis lokal Pamekasan ini juga dipengaruhi karakteristik dari masing-masing kepala sekolah dan juga diakibatkan faktor eksternal kebijakan yaitu sosial, ekonomi, dan politik yang memaksa beberapa kepala sekolah tidak bisa mewajibkan siswa-siswinya untuk memakai batik tulis lokal Pamekasan, selain itu tidak adanya sosialisasi dan pemantauan kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

juga mengakibatkan kepala sekolah menjadi kurang disiplin untuk melaksanakan kebijakan

Akan tetapi ada beberapa sekolah yang juga disiplin melaksanakan kebijakan ini dengan tegas mewajibkan siswa-siswinya untuk memakai batik tulis lokal Pamekasan baik itu dengan memberikan seragam batik tulis lokal Pamekasan atau dengan membebaskan motif batik yang dipakai dengan catatan harus batik tulis lokal Pamekasan

#### 4) Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas pelaksana

Dalam kebijakan ini perlunya melihat komunikasi yang terjadi karena dalam implementasi sebuah kebijakan terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan agar tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan dapat dicapai. Semakin baik organisasi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan berpeluang kecil begitu pula sebaliknya. Mengingat dalam Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 ini melibatkan seluruh instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini komunikasi tentang kebijakan memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan ini memang tidak terlalu rumit yang melibatkan Bupati Pamekasan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan serta Sekolah-Sekolah dilingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Selain itu, hasil wawancara yang ditemui dilapangan untuk beberapa sekolah komunikasi yang ada tidak hanya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan namun juga dengan wali murid siswa serta komite sekolah terkait dengan batik tulis yang digunakan mau diseragamkan sekolah atau bebas memakai batik tulis lokal tanpa diseragamkan namun dengan wali murid atau siswa membeli sendiri

Komunikasi yang berjalan masih kurang baik dimana beberapa sekolah tidak mengkomunikasikan kendala-kendala implementasi kebijakan yang dihadapi terkait kebijakan ini terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sehingga kendala-kendala dalam proses implementasi kebijakan tidak ditindaklanjuti dan kendala-kendala tersebut tidak dapat diatasi oleh pelaksana kebijakan

#### 5) Sikap/kecenderungan para pelaksana (disposisi)

Respon implementor dalam kebijakan ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan terkesan sudah tidak mengontrol lagi jalannya kebijakan memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana sudah tidak pernah lagi ada pematuan dan sosialisasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ke sekolah-sekolah dibawah naungannya, hal ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan banyaknya siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

#### 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Didalam kebijakan tentang pemakaian seragam batik tulis lokal pamekasan ini ketiga elemen tersebut sama-sama memiliki dampak baik secara sosial ekonomi dan politik sebagai berikut :

##### a. Sosial

Kondisi sosial dapat mempengaruhi suatu kebijakan baik berdampak positif atau sebaliknya akan berdampak negatif pada kebijakan yang ada seperti halnya dalam Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dimana kondisi sosial yang ada berpengaruh terhadap kebijakan ini, pengaruh yang timbul adalah lemahnya pendidikan utamanya wali murid siswa siswi juga berpengaruh terhadap pengetahuan tentang kebijakan ini serta kurang memahami tentang batik lokal Pamekasan sehingga saat sekolah mewajibkan seragam batik meskipun bukan batik lokal Pamekasan wali murid langsung setuju tanpa ada kritik, Sehingga perlu adanya suatu sosialisasi kembali perihal Kebijakan ini agar sekolah dan wali murid menjadi lebih memperhatikan dan melaksanakan aturan ini

##### b. Ekonomi

Kondisi ekonomi suatu masyarakat dapat sangat mempengaruhi keberhasilan atau gagalnya suatu kebijakan oleh pemerintah termasuk dalam kebijakan ini, dimana kondisi ekonomi masyarakat yaitu sebagai kelompok sasaran dalam kebijakan ini adalah siswa-siswi untuk memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan sangat berpengaruh khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di desa dimana wali murid masih berada di kelas ekonomi menengah kebawah yang mengakibatkan mereka kurang



mampu untuk membeli batik tulis lokal pamekasan yang mereka beranggapan harganya lebih mahal dari batik yang lain.

Secara ekonomi kebijakan ini pada tahap awal implementasi memberikan dampak peningkatan perekonomian yang sangat baik bagi para pengrajin batik tulis lokal Pamekasan, akan tetapi pada rentang waktu 2011 sampai sekarang omset penjualan batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya sekolah-sekolah yang tidak mewajibkan siswa-siswinya untuk memakai batik tulis lokal Pamekasan.

#### c.Politik

Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini juga di pengaruhi oleh kondisi politik di pamekasan sendiri dimana kebijakan ini sudah berjalan sangat lama mulai dari tahun 2007 sampai sekarang, penyebab pengaruh politik yang ditimbulkan adalah akibat pergantian kepala daerah di Pamekasan sejak kebijakan ini dilaksanakan kepala daerah Kabupaten Pamekasan sudah berganti dua kali sehingga hal ini juga mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan yang sekarang mulai mengalami permasalahan implementasi.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil uraian analisis mengenai implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang sudah penulis paparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sudah diimplementasikan namun berjalan kurang baik. Hal ini di dasarkan padavariabel implementasi Van Matter dan Van Horn dalam Agustino (2012:133-136) yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan pelaksana, komunikasi antar organisasi dan lingkungan ekonomi, social dan politik

Ditinjau dari variabel yang pertama yaitu Standar dan sasaran kebijakan, implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 yang mana sasaran dalam kebijakan ini adalah untuk

menumbukembangkan industri kecil batik tulis lokal Pamekasan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pengrajin batik tulis lokal Pamekasan serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan sasaran yang ditetapkan belum tercapai secara maksimal hal ini dapat dilihat dari UKM batik tulis lokal Pamekasan yang produksi batik tulis lokal Pamekasan dan omset penjualannya mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya masih banyak sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang tidak mewajibkan siswa-siswinya untuk memakai batik tulis lokal Pamekasan.

Kedua, Sumber Daya, Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan bahwa sumber daya yang ada sudah memadai, yang digunakan manusia dan sumber daya waktu karena dalam kebijakan ini tidak ada anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Sumber daya yang digunakan berupa sumber daya manusia sebagai pelaksana dan sumber daya waktu yang ada untuk mengimplementasikan kebijakan tentang pemakaian seragam batik lokal Kabupaten Pamekasan yang dalam hal ini secara kuantitas tidak mengalami permasalahan, Dalam sumber daya waktu yang diperlukan sudah sangat mencukupi mengingat hal kebijakan ini sudah terimplementasi sudah berjalan lama dan tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya karena kebijakan terus berjalan dengan terus menerus sejak tahun 2007 kebijakan ini dikeluarkan hingga saat ini tetap berlaku kebijakan ini Sumber daya dana hanya ada pada sekolah-sekolah yang menyeregamkan batik tulis lokal yang seragam batiknya diakomodir oleh sekolah itu sendiri namun sudah disepakati wali murid dan komite sekolah

Ketiga, Karakteristik Agen Pelaksana Dalam implementasi kebijakan memakai batik tulis lokal bagi siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang mendapat aturan langsung dari Bupati Pamekasan dan selanjutnya dilanjutkan kepada sekolah-sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Dalam pelaksanaan Kebijakan ini memang masih ada yang kurang sesuai dengan hasil dilapangan dimana



masih banyak menemui siswa-siswi yang tidak memakai seragam batik tulis lokal Pamekasan. yang menunjukkan kurangnya ketegasan dari para pelaksana yaitu yang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan dan sekolah-sekolah dilingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Hal ini juga dapat dilihat dari pelaksanaannya hingga saat ini hampir tidak pernah dilakukan pemantauan karena pelaksana khususnya Disdik Kabupaten Pamekasan cenderung menilai kebijakan sudah berjalan baik meskipun sangat berbeda dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Keempat, Komunikasi antar organisasi dan Aktivitas pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ini komunikasi tentang kebijakan memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan ini memang tidak terlalu rumit yang melibatkan Bupati Pamekasan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan serta Sekolah-Sekolah dilingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan namun hasil dilapangan menunjukkan komunikasi yang berjalan kurang baik dimana beberapa sekolah tidak mengkomunikasikan kendala-kendala implementasi kebijakan yang dihadapi terkait kebijakan ini terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

Selain itu, hasil dilapangan untuk beberapa sekolah komunikasi yang dilakukan tidak hanya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan namun juga dengan wali murid siswa serta komite sekolah terkait dengan batik tulis yang digunakan mau diseragamkan sekolah atau bebas memakai batik tulis lokal tanpa diseragamkan namun dengan wali murid atau siswa membeli sendiri

Kelima, Sikap/kecenderungan para pelaksana/disposisi dalam Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 juga sangat penting, Respon implementor dalam kebijakan ini yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan terkesan sudah tidak mengontrol lagi jalannya kebijakan memakai batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana sudah tidak pernah lagi pematuan dan sosialisasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan ke sekolah-sekolah dibawah naungannya, hal ini yang menjadi salah satu penyebab timbulnya permasalahan banyaknya siswa-siswi dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.

Keenam, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik Untuk melihat kinerja Implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan, ketiga elemen tersebut sama-sama

memiliki dampak terhadap kebijakan secara sosial, ekonomi dan politik.

Aspek Sosial, Pada kebijakan yang ada seperti halnya dalam Kebijakan ini dimana kondisi sosial yang ada berpengaruh terhadap kebijakan, pengaruh yang timbul adalah lemahnya tingkat pendidikan wali murid siswa siswi yang berpengaruh terhadap pengetahuan tentang kebijakan ini serta kurang memahami tentang batik lokal Pamekasan sehingga saat sekolah mewajibkan seragam batik meskipun bukan batik lokal Pamekasan wali murid langsung setuju tanpa ada kritik.

Aspek ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat dalam implementasi kebijakan ini kondisi ekonomi masyarakat khususnya bagi sekolah-sekolah yang ada di desa dimana wali murid masih berada di kelas ekonomi menengah kebawah mereka kurang mampu untuk membeli batik tulis lokal Pamekasan karena mereka beranggapan harganya mahal.

Dampak Secara ekonomi kebijakan ini pada tahap awal implementasi memberikan dampak peningkatan perekonomian yang sangat baik bagi para pengrajin batik tulis lokal Pamekasan, akan tetapi pada rentang waktu 2011 sampai sekarang omset penjualan batik tulis lokal Kabupaten Pamekasan yang salah satu penyebabnya adalah banyaknya sekolah-sekolah yang tidak mewajibkan siswa-siswinya untuk memakai batik tulis lokal Pamekasan.

Aspek Politik, Kebijakan ini juga di pengaruhi oleh pengaruh politik yang ditimbulkan adalah akibat pergantian kepala daerah di Pamekasan sejak kebijakan ini dilaksanakan kepala daerah Kabupatem Pameksan sudah berganti dua kali sehingga hal ini juga mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan yang sekarang mulai mengalami permasalahan implementasi.

#### **Saran**

Dari hasil uraian tentang implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan yang dalam proses implementasinya menemui beberapa permasalahan maka perlunya beberapa hal yang harus diperbaiki. Adapun saran yang dapat diajukan peneliti untuk peningkatan implementasi Kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan sosialisasi kembali oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan perihal kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan di

- Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan kepada Sekolah-sekolah dibawah naungannya dan kepada Wali Murid
2. Peningkatan komunikasi oleh kepala-kepala sekolah tentang kendala yang ditemui selama jalannya implementasi kebijakan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 530/320/441.303/2007 tentang Pemakaian Seragam Batik Tulis Produksi Pengrajin Pamekasan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan
  3. Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan hendaknya melakukan komunikasi dengan para pengrajin batik tulis lokal Pamekasan untuk memproduksi batik tulis lokal dengan harga yang terjangkau oleh wali murid yang kurang mampu secara ekonomi.
  4. Secara aspek sosial sekolah hendaknya memberi keringanan dalam membeli seragam batik tulis Pamekasan dengan cara pembayaran yang dapat dicicil

## DAFTAR PUSTAKA

### Pustaka dari Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Cv.Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan. 2014, Ed. 2, Cet. 16. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta : Elex Media Komputer.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2007. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Wahab, Abdul Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abdul Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, joko. 2010. *Analisis kebijakan publik (konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik)*. Malang : Bayumedia

### Pustaka dari Internet

- UPH Media Relations, BATIK SEBAGAI IDENTITAS BANGSA INDONESIA, Tahun 2012 <http://www.uph.edu/id/component/wmnews/new/1270.html/> (diakses 25 maret 2016)
- Sakina Rakhma Diah Setiawan, AMERIKA SERIKAT JADI TUJUAN EKSPOR TERBESAR BATIK, Tahun 2015. <http://female.kompas.com/read/2015/10/04/140600020/Amerika.Serikat.Jadi.Tujuan.Ekspor.Terbesar.Batik/>(diakses 11 april 2016)
- [http://disperindag.pamekasankab.go.id/?page\\_id=113](http://disperindag.pamekasankab.go.id/?page_id=113)(diakses 21 april 2016)
- Marzuky.choir, PENJUALAN BATIK MEROSOT TAJAM, PEREKONOMIAN PENGRAJIN LESU, Tahun 2016. <http://portalmadura.com/penjualan-batik-merosot-tajam-ekonomi-pengrajin-lesu-45323/>(diakses 21 april 2016)
- [eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%2008417141005.pdf](http://eprints.uny.ac.id/8552/3/BAB%20%20-%2008417141005.pdf) (diakses tanggal 19 mei 2016)

### Pustaka dari Skripsi

- Hermawati, yuni. Dkk. Peran Pemerintah Dan Masyarakat dalam Upaya Melestarikan Batik Pring di Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *jurnal-online.um.ac.id*(diakses 04 mei 2016)
- [etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S1-2013-285507-chapter1.pdf](http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/.../S1-2013-285507-chapter1.pdf) diakses 04 mei 2016
- Murtadlo,arif. UPAYA PENGEMBANGAN USAHA PENGRAJIN BATIK MALANGAN. 2013. (Studi Kasus di Desa Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang)
- [www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/181/14](http://www.jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/181/14)(diakses 04 mei 2016)